

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan hasil Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012 terlihat beberapa data sebagai bukti belum tercapainya program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) di Indonesia, diantaranya Angka Kematian Ibu (AKI) sebesar 359/100.000, Angka Kematian Bayi (AKB) 32/1000 dan Angka Kematian Balita (AKABA) 40/1000.<sup>1-3</sup> Kondisi tersebut menunjukkan status derajat kesehatan yang masih rendah.

Fenomena tingginya AKI, AKB dan AKABA memerlukan perhatian dan keterlibatan semua pihak, baik organisasi masyarakat maupun pemerintah. Keterlibatan masyarakat dan pemerintah tertuang dalam kebijakan berupa program Usaha Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang berisi kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan mengutamakan peran masyarakat sebagai subyek sekaligus obyek dari sistem kesehatan.<sup>4-6</sup>

Program pemberdayaan masyarakat merupakan proses yang dilakukan oleh masyarakat untuk memperbaiki kondisi lingkungan dan aspek lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh dalam kesehatan masyarakat. Masyarakat diharapkan mampu mengatasi masalah kesehatan mereka sendiri secara mandiri dengan program pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan.<sup>4</sup>

Prinsip pemberdayaan masyarakat diterapkan dalam program pembangunan kesehatan, salah satu contoh adalah Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Posyandu

merupakan kegiatan yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat. Keberadaan posyandu dapat memberikan kemudahan dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar meliputi: Keluarga Berencana (KB), Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Gizi, Imunisasi dan penanggulangan diare. Tujuan utama program posyandu adalah mempercepat penurunan angka kematian ibu, bayi dan balita.<sup>5,6</sup>

Posyandu berhasil menurunkan AKI dan AKB sejak awal berdiri, tetapi hal ini mengalami penurunan pada tahun 2012. Data SDKI menunjukkan peningkatan AKI dari 228/100.000 menjadi 359/100.000 dan angka kejadian gizi kurang pada balita meningkat dari 17,9% menjadi 19,6%, sedangkan AKB menurun tetapi tidak signifikan dan masih jauh dari target pemerintah. Hasil pencapaian tersebut tidak sejalan dengan perkembangan jumlah posyandu yang terus bertambah, hal ini ditunjukkan oleh data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2012 mencatat jumlah Posyandu di Indonesia sebanyak 276.392 ditandai dengan ditemukannya posyandu setiap desa/kelurahan.

Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu wilayah dengan populasi penduduk yang banyak mempunyai posyandu sebanyak 50.266. Jumlah posyandu yang semakin meningkat tidak diimbangi oleh penambahan kader. Hal ini bisa dilihat dari data posyandu di Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 2.239 dengan jumlah kader sebanyak 10.800 orang, sementara jumlah posyandu untuk kecamatan Manonjaya sebagai salah satu wilayah dengan populasi terbanyak di Kabupaten Tasikmalaya mempunyai posyandu sebanyak 72 dengan jumlah kader aktif 249 orang. Jika dihitung rata-rata kader aktif pada setiap posyandu adalah 3 orang,

sedangkan kebutuhan kader di posyandu berdasarkan layanan kegiatan 5 meja adalah 5 orang setiap posyandu.<sup>1-2,7</sup>

Secara teoritis kader posyandu adalah tenaga sukarela berasal dari masyarakat yang dipilih, bersedia, mampu dan memiliki waktu untuk melakukan kegiatan posyandu. Kader di setiap posyandu sebanyak 5 orang sesuai dengan jumlah kegiatan utama posyandu berdasarkan sistem layanan 5 meja atau 5 langkah kegiatan, yaitu: pendaftaran; penimbangan; pencatatan/ pengisian kartu menuju sehat (KMS); penyuluhan; dan pelayanan kesehatan sesuai kewenangannya. Dengan demikian, diharapkan Kader posyandu dapat menjadi motor penggerak dalam kegiatan posyandu dan mampu memenuhi langkah kegiatan posyandu serta melaksanakan minimal satu program pokok posyandu<sup>5-6,8</sup>

Berdasarkan hasil studi pendahuluan melalui wawancara kepada 5 orang ibu rumah tangga di kecamatan Manonjaya, didapatkan informasi bahwa mereka tidak mau menjadi kader karena pekerjaan kader sangat berat dan tidak mendapatkan gaji, sehingga mereka lebih memilih tinggal dirumah dan mencari pekerjaan sampingan yang bisa dikerjakan dirumah. Sebagian besar dari mereka tidak mengetahui tugas dan tanggung jawab kader. Selama ini proses perekrutan kader dengan cara ditunjuk langsung pada pengunjung posyandu, sehingga beberapa diantaranya tidak melakukan pekerjaannya dengan baik. Hal ini diduga karena mereka tidak memiliki pengetahuan yang baik, sikap yang positif untuk menjadi kader posyandu, sehingga diperlukan pendekatan dengan cara memberikan pelatihan yang sesuai untuk meningkatkan pengetahuan dan sikap masyarakat tentang kader posyandu dan diharapkan dapat menjadi bekal motivasi untuk

menjadi kader aktif. Disamping pelatihan langsung, dukungan dari tokoh masyarakat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keikutsertaan kader. Hal ini sejalan dengan pendapat Daniel bahwa dukungan dan anjuran dari tokoh masyarakat merupakan salah satu bentuk motivasi dan semangat bagi kader dalam menjalankan tugasnya.<sup>9-13</sup>

Seyogianya proses pengangkatan kader posyandu dilakukan melalui musyawarah dengan mufakat, maka diperlukan pelatihan untuk menumbuhkan motivasi masyarakat serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pelatihan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keaktifan kader posyandu. Pelatihan dilakukan efektif dan efisien baik waktu, dana, fasilitas, maupun tenaga dengan pemberian modul pelatihan, sehingga dapat mencapai tujuan pelatihan secara optimal. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Nurmi yang menyatakan bahwa penggunaan modul dalam pelatihan dapat meningkatkan perilaku kader.<sup>14-15</sup>

Informasi yang didapatkan dari petugas puskesmas, selama ini para kader mendapatkan pelatihan posyandu dengan materi yang terdapat pada modul pelatihan kader posyandu tahun 2012. Modul tersebut berisi materi keterampilan kader posyandu dengan harapan menghasilkan kader yang handal dalam upaya pengembangan posyandu. Sebagaimana kita ketahui bahwa kader adalah tenaga sukarela yang bekerja tanpa imbalan, tuntutan yang terlalu tinggi tersebut diduga dapat menyebabkan menurunnya motivasi kader posyandu, terbukti dari data yang menunjukkan rendahnya kesertaan posyandu yaitu 60%. Hal ini dapat terlihat dari angka kader aktif pada setiap posyandu 3-4 orang.

Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan upaya untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran kader dalam pengelolaan posyandu, sehingga dibutuhkan pelatihan motivasi menggunakan modul terintegrasi yang berisi materi untuk memotivasi masyarakat serta materi penunjang dari para tokoh agama dan tokoh sosial untuk memberikan penguatan tentang peran penting kader posyandu. Dengan adanya Pelatihan motivasi menggunakan modul terintegrasi diharapkan dapat menambah jumlah kader posyandu serta memenuhi jumlah kader 5 orang setiap posyandu.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tema sentral dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: adanya posyandu memberikan manfaat yang besar dalam pencapaian program KIA khususnya dalam penurunan AKI dan AKB serta meningkatnya angka umur harapan hidup Indonesia. Jumlah posyandu di Indonesia pada saat ini semakin bertambah setiap tahunnya, namun tidak diimbangi dengan kualitas yang semakin menurun. Hal ini diduga karena kurangnya sumber daya manusia yang mengelola posyandu yaitu kader, terbukti dari data yang menunjukkan rata-rata jumlah kader aktif adalah 3-4 orang pada setiap posyandu, sedangkan kebutuhan kader di posyandu berdasarkan layanan kegiatan 5 meja adalah 5 orang. Sedikitnya jumlah kader aktif menggambarkan peran serta masyarakat yang masih rendah, maka perlu diupayakan penambahan jumlah kader posyandu untuk mencapai jumlah 5 orang setiap posyandu melalui pelatihan. Pelatihan kader posyandu terintegrasi nilai-nilai agama, sosial dan motivasi diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk menjadi kader posyandu. Pemberian pelatihan kepada masyarakat dengan menggunakan modul sebagai salah satu media informasi tentang posyandu dapat menjadi salah satu sarana yang digunakan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan keikutsertaan menjadi kader posyandu sehingga dapat mencapai tujuan program pelatihan dengan lebih optimal.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka penting untuk dilakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pelatihan Kader Posyandu dengan Modul Terintegrasi terhadap Peningkatan Pengetahuan, Sikap dan Keikutsertaan Kader Posyandu”

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut

1. Apakah pelatihan kader posyandu dengan modul terintegrasi lebih baik dalam meningkatkan pengetahuan dibandingkan dengan modul standar?
2. Apakah pelatihan kader posyandu dengan modul terintegrasi lebih baik dalam meningkatkan sikap dibandingkan dengan modul standar?
3. Apakah pelatihan kader posyandu dengan modul terintegrasi lebih baik dalam meningkatkan keikutsertaan kader posyandu dibandingkan dengan modul standar?

## 1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengaruh pelatihan kader posyandu dengan modul terintegrasi terhadap peningkatan pengetahuan
2. Menganalisis pengaruh pelatihan kader posyandu dengan modul terintegrasi terhadap peningkatan sikap
3. Menganalisis pengaruh pelatihan kader posyandu dengan modul terintegrasi terhadap peningkatan keikutsertaan kader posyandu

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1. Aspek Teoritik**

- a. Untuk dijadikan bahan referensi dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya terkait dengan perekrutan kader posyandu.
- b. Untuk dijadikan dasar pengembangan penelitian selanjutnya.

### **2. Aspek Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi pemangku kebijakan dalam perekrutan kader posyandu guna meningkatkan fungsi posyandu serta mempertahankan kader aktif.

